



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASKOLANI**
2. Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**
3. NHK : **103536**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **17.398.984.000**

1. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/34 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/113 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 3.050.000.000
5. Tanah Seluas 312 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR ,
HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 208 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.798.704.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.700.280.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **1.899.000.000**

1. MOBIL, ALPHARD 2.5G AT AL30GAT10 Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 800.000.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2,5 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
185.000.000



3. MOBIL, TOYOTA NEW CAMRY 2.5V Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 460.000.000

4. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0V Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
454.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.574.720.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 21.879.027.250

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.026.923.922

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.503.354.482

Sub Total Rp. 57.282.009.654

III. HUTANG Rp. 315.805.813

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 56.966.203.841

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.